

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunanegara, 2008, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2020, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Edisi Cet. Ke-9, Djambatan, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- John M., 2005, *Kamus an English Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir, Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salinde, John, 2007, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Edisi Cet. Ke-3 Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 2007, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Sitorus, Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

- Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soimin, S., 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, sinar grafika, Jakarta.
- Sugianto, Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sutedi, A, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syah, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata, Jakarta.
- tehupeiory, 2020, *Format Hukum Yang Melindungi Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah (Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah)*, UKI Press, Jakarta.
- Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, 2019, *Hukum Acar Perdata*, Unimal Press, Sulawesi.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 836).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 827).

Jurnal

62

Endrawati, Netty. *"Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Nasional Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 jo Keppres No. 34 Tahun 2003"*, dalam Jurnal Legality, Vol. 12 No. 2, 2005.

Koeswahyono, *"Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum"*, Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Brawijaya, Vol 1 No. 1, Agustus 2008.

Tohari & Amien. *"Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa"* dalam Jurnal Bhumi Nomor 40. Yogyakarta: PPPM-STPN, 2014.

Zakarsih & Amelia, *"Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah)"*, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No.2, Oktober 2018.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Dwi Putra, 2023, *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada"*

⁶² Adrianto, Astriana, *"Pemanfaatan Biochar Tongkol Jagung Guna Perbaikan Sifat Kimia Tanah Lahan Kering"*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 1, No. 3, 2022.

Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Uniservitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putri, S. P., 2018, “*Mekanisme Penilaian Tanah Dan Konsinyasi Terhadap Bidang Tanah Yang Mengalami Penolakan Dari Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Halaman.*” *Angewandte Chemie International Edition*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Rombe, E. N., 2023, “*Tinjauan yuridis konsinyasi pembayaran kerugian tanah untuk pembangunan saluran udara bertegangan ekstra tinggi*” Skripsi, Universitas hasanuddin Makassar, Makasaar.

Internet

Pengadilan Negeri Gresik, “Sistem informasi pelayanan publik (SIPP) Rekapitulasi klasifikasi Permohonan Konsinyasi”, diakses pada tanggal 23 April 2025.

Pengadilan Negeri Tabanan, ”Sejarah Pengadilan Negeri” <https://pn-tabanan.go.id/layanan>

Badan Pusat Stastik Gresik, ”Pertumbuhan Ekonomi”, diakses pada 3 Maret 2025 <https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/843/pertumbuhan-ekonomi-2024.html>

Lain Lain

Ersin, (14 November 2025), Pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, Gresik, (Margareth Manullang, Interviewer)

Fatkur, (13 Juni 2025), Pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, Gresik, (Margareth Manullang, Interviewer)

Meyti Sembiring, (20 Juni 2025), Pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, Gresik, (Margareth Manullang, Interviewer)

Mohammad Hamidi, (23 April 2025), Pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, Gresik, (Margareth Manullang, Interviewer)

Nurroso, (23 Mei 2025), Pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, Gresik, (Margareth Manullang, Interviewer)